

KETAHANAN PANGAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI

(Food Security and Farmers Well-being)

Mochamad Syawie

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Kementerian Sosial Republik Indonesia
Email: msyawie@yahoo.com

Abstrak

Artikel ini merupakan sebuah ulasan dari berbagai studi tentang persoalan ketahanan pangan dan perihal kesejahteraan petani. Tujuan dari ulasan ini adalah untuk menginformasikan bahwa Indonesia secara geografis mempunyai keunggulan komparatif dibandingkan dengan Negara manapun, salah satu keunggulan pada lahan pertanian dan perkebunan yang subur. Dengan keunggulan ini Indonesia seharusnya mampu menjadi negara maju dalam sektor pertanian. Di sisi lain, cenderung terdapat penyusutan produksi padi, jika pada tahun 2007 surplus beras mencapai 4,96 persen, lalu tahun 2008 sekitar 5,4 persen, dan 2009 menjadi 6,7 persen, tahun lalu surplus hanya 1,17 persen. Lahan-lahan pertanian terus menyusut akibat pengalihan fungsi menjadi perumahan dan industri. Diperlukan 15 juta hektar lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan pada 2030. Krisis pangan mengancam jika konversi lahan pertanian tak dicegah.

Kata Kunci: Ketahanan pangan dan kesejahteraan petani

Abstract

The article discusses the issues of food security and farmers well-being as taken by several different studies. The purpose is to inform that geographically Indonesia is very rich on its natural resources compared to other countries. One of them is on its fertile agriculture and plantation. This specialty should make Indonesia be a country in the world leading in agriculture. Unfortunately, the rice field production seems to be decreasing. Data shows that in 2007, Indonesia had a surplus on rice production up to 4,96 % and kept on increasing in 2008 (5,4%) and in 2009 (6,7%). Unfortunately, the surplus of production decreased in 2011 and it has reached 1,17%. This relates to the fact that the land for agriculture is gradually being utilized for industries and housings. Approximately, Indonesia needs 15 million hectare for agriculture land to fulfill country food stock in 2030. Inability to reach this number would create food scarcity in the country as the result of inability to prevent the agriculture land conversion.

Keywords : food security and farmers well-being

PENDAHULUAN.

Editorial Media Indonesia (10/02/2012) mengabarkan bahwa persoalan pangan ternyata terus menjadi masalah yang tidak kunjung tuntas. Julukan sebagai lumbung pangan yang disematkan pada negeri ini juga tidak menggaransi Indonesia terbebas dari krisis pangan. Dalam seminar *Food Security Summit 2012* di Jakarta, awal pekan ini, kekhawatiran bakal munculnya krisis pangan

kembali mengemuka. Sebabnya jelas, yakni ketersediaan lahan produksi pangan tidak mampu mengimbangi pesatnya pertumbuhan penduduk. Implikasinya, produksi pangan harus semakin banyak, tetapi lahan pertanian justru kian menyempit. Tingginya konversi lahan pangan ke nonpangan membuat produksi pangan cenderung stagnan.

Tampak jelas, masalah peningkatan kebutuhan pangan karena penduduk dunia dan

konsumsi per kapita meningkat belum teratasi. Penduduk dunia tahun 2012 sekitar 7 milyar jiwa, bertambah satu milyar dari tahun 1999. Ke depan, penduduk dunia akan bertambah satu miliar setiap 10 tahun dan pangan akan menjadi masalah dunia (Siswono Yudo Husodo, 2012). Kondisi pangan Indonesia ke depan menjadi rawan karena pertambahan penduduk 1,3 persen/tahun. Meningkatnya kesejahteraan, rakyat Indonesia menuntut pangan yang lebih banyak dan berkualitas. Tahun 1999, sebanyak 25 persen penduduk Indonesia adalah kelas menengah dengan pengeluaran 2-20 dollar AS/hari. Tahun 2012, kelas menengah ini menjadi 56,5 persen dari 237 juta penduduk.

Ancaman krisis pangan nasional semakin bertambah karena adanya pemanasan global. Musim pasa tahun ini, Amerika Serikat, produsen pangan terbesar dunia, mengalami kekeringan di 60 persen wilayah pertaniannya. Dampaknya memengaruhi persediaan pangan dunia sehingga harga melonjak. AS menghasilkan jagung 400 juta ton/tahun (Indonesia 18 juta ton), kedelai 16 juta ton/tahun (Indonesia 600.000 ton), dan gandum 56 juta ton. Cina yang merupakan produsen sekaligus konsumen besar pangan juga menurun produksinya akibat banjir besar. Maka, Indonesia harus bersaing di pasar dunia yang pasokannya menipis (Siswono Yudo Husodo, 2012).

Menarik apa yang ditulis Tajuk Rencana Kompas (10/2) tentang rapuhnya ketahanan pangan. Ada persoalan dari hulu hingga hilir yang membuat pangan masih jadi persoalan pelik bagi kita. Bagaimanan bicara ketahanan pangan jika petani yang berada di garis depan pemenuhan pangan nasional terus terpinggirkan. Bagaimana bicara menggenjot produksi jika insentif produksi absen, infrastruktur pertanian dibiarkan terbengkalai, inovasi teknologi nihil, alih lahan produktif terus terjadi, dan jaringan distribusi kedodoran. Juga bagaimana tidak rawan pangan jika petani dibiarkan bergulat

sendiri menghadapi serangan hama, tekanan rentenir, dan regulasi yang tidak berpihak. Lahan-lahan pertanian terus menyusut akibat pengalihan fungsi menjadi perumahan dan industri. Impor pangan Indonesia tahun lalu mencapai Rp 125 triliun. Diperlukan 15 juta hektar lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan pada 2030 (Gatra, No. 27. 10-16 Mei 2012). Krisis pangan mengancam jika konversi lahan pertanian tak dicegah.

Masyarakat dunia kembali memperingati Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-31 pada 16 Oktober. FAO berharap angka kelaparan di tengah masyarakat dunia-kini mencapai satu miliar orang-dapat dikurangi. Dengan demikian tema, tema Hari Pangan Sedunia yang ditetapkan yakni *Food prices from crisis to stability*. Di Indonesia, Hari Pangan Sedunia yang dirayakan secara nasional di Kabupaten Bone Balango, Provinsi Gorontalo, mengambil tema *Menjaga stabilitas harga dan akses pangan menuju ketahanan pangan nasional*. HPS adalah sebuah momen yang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk membangun kesamaan pemikiran guna menuju sebuah sinergi dalam mengimplementasikan berbagai program pembangunan yang relevan dalam menangani permasalahan ketahanan pangan nasional (Posman Sibuea, 2011). Krisis pangan yang dihadapi Indonesia saat ini akan kian masif jika terus mengandalkan impor kebutuhan pangan tanpa memperhatikan dan menggenjot produksi pangan lokal. Ketergantungan pada pangan impor mencapai 65 persen dari kebutuhan nasional.

Selama puluhan tahun neraca perdagangan pertanian pertanian surplus. Tahun lalu nilainya 18,537 miliar dollar AS atau Rp 166,83 triliun. Surplus terjadi karena membaiknya kinerja subsektor perkebunan, terutama kelapa sawit. Sebaliknya, neraca subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan negatif. Kinerja ketiga subsektor itu jauh dari menggembirakan

(Khudori, 2012). Dari ketiganya, defisit paling mencemaskan terjadi di subsektor tanaman pangan dan peternakan. Tahun 2009, deficit terbesar terjadi di subsektor tanaman pangan. Akan tetapi, tahun 2010 dengan defisit 3,505 miliar dollar AS, peternakan menggeser posisi subsektor tanaman pangan (3,416 miliar dollar AS). Dengan demikian, di luar impor hortikultura, impor pangan dan produk peternakan justru paling mencemaskan. Tahun lalu, defisit subsektor hortikultura 1,197 miliar dollar AS. Kalaupun tahun impor meledak, nilainya tak akan melampaui impor tanaman pangan atau peternakan.

Indonesia secara geografis mempunyai keunggulan komparatif dibandingkan dengan negara mana pun, salah satunya, keunggulan pada lahan pertanian dan perkebunan yang begitu subur. Dengan keunggulan ini Indonesia sebarusnya mampu menjadi negara maju dalam sektor pertanian. Kenyataan ini sudah disadari sejak masa kolonial Pemerintah Hindia Belanda, sehingga digulirkanlah dua program besar mengenai pemebangunan sektor pertanian dan industrialisasi substitusi impor. Dua program kebijakan ini segera mengundang kontroversi pada hal mana yang mesti didahulukan. Hindia Belanda mengambil langkah untuk mendahulukan kepentingan kolonial sesuai dengan pembagian kerja internasional dalam mengadakan bahan-bahan mentah. Maka irigasi untuk perkebunan yang berorientasi ekspor pun didahulukan daripada merevitalisasi sektor pertanian (M. Dawam Rahrdjo, 2011)

Menarik untuk dicermati peringatan Badan Pusat Statistik mengenai kemungkinan terjadinya kondisi rawan pangan pada akhir 2011 dan awal 2012 memunculkan keprihatinan kita (Tajuk Rencana Kompas, 3/11/2011). Ada beberapa persoalan di sini. Pertama, turunnya angka produksi beras, jagung, dan kedelai, yang justru terjadi di tengah langkah pemerintah mencanangkan surplus berasa 10

juta ton dan swasembada jagung, kedelai dan gula. Kedua, tak tercapainya target stok Bulog akibat minimnya pengadaan. Ketiga, situasi pasokan beras di pasar dunia yang terganggu, terutama dengan adanya banjir di Thailand. Keempat, buruknya statistik perberasan yang membingungkan terkait produksi karena belum lama BPS mengatakan terjadi surplus produksi 4-5 juta ton.

Kecemasan bakal terjadinya krisis pangan di berbagai negara termasuk Indonesia bukan hanya isapan jempol. Sejumlah indikator menunjukkan hal itu. Di Indonesia, pertumbuhan produksi padi, yang merupakan bahan pangan paling banyak dikonsumsi penduduk, mulai menyusut. Jika pada tahun 2007 surplus beras mencapai 4,96 persen, lalu tahun 2008 sekitar 5,4 persen, dan 2009 menjadi 6,7 persen, tahun lalu surplus hanya 1,17 persen (Media Indonesia, 19/2/2011).

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan tingkat konsumsi beras yang terus naik. Pada 2003 konsumsi beras penduduk Indonesia masih 135 kg tiap orang per tahun. Pada 2009 sudah naik menjadi sekitar 139 kg per orang tiap tahun. Angka konsumsi tersebut meletakkan orang Indonesia sebagai konsumen beras tertinggi di dunia. Rata-rata konsumsi beras internasional hanya sekitar 60 kg/orang/tahun.

Di tengah konsumsi yang masih sangat tinggi, produksi padi nasional tahun ini diprediksi merosot. Perubahan iklim yang memicu serangan hama dan terus berkurangnya lahan pertanian diprediksi bakal menyebabkan kemerosotan hasil panen hingga 30 persen. Itulah yang membuat pemerintah kembali membuka keran impor demi menjaga ketersediaan beras dalam negeri setelah pada 2008 dan 2009 impor beras ditiadakan. Tahun lalu, impor beras diproyeksikan 1,75 juta ton. Jika itu terjadi, menurut laporan Kementerian Pertanian Amerika Serikat yang bertajuk *Rice*

Outlook, Indonesia menjadi negara importer beras kedua terbesar di dunia setelah Nigeria.

Persoalan Ketahanan Pangan

Salah satu persoalan besar bangsa di masa depan adalah bagaimana menyediakan pangan yang cukup bagi perut semua warga. Salah satu indikator kesanggupan member makan bisa ditilik dari indeks luas panen per kapita. Di Asia Tenggara, indeks luasan panen per kapita Indonesia termasuk kecil, hanya 531 meter persegi per kapita, setara Filipina (516) dan Malaysia (315). Filipina dan Malaysia adalah pengimpor pangan reguler (Khudori, 2011). Negara-negara pengekspor pangan memiliki indeks luasan panen perkapita cukup besar: Vietnam 929 meter persegi/kapita, Myanmar 1.285 meter persegi/kapita, dan Thailand 1.606 meter persegi/kapita. Memang indeks ini bukan satu-satunya penentu besarnya produksi. Luasan panen dapat dikompensasikan dengan produktifitas tinggi.

Masalah kelaparan dan kemiskinan merupakan fenomena global yang telah lama. Pada Konferensi Tingkat Tinggi Pangan di Roma tahun 1996, para pemimpin dunia bertekad mengurangi kelaparan dari 840 juta orang menjadi 400 juta orang sampai 2015 (Kaman Nainggolan, 2006). Kelaparan terjadi karena keterbatasan akses pangan. Satu orang anak mati setiap lima detik sebagai akibat kelaparan dan kurang gizi. Kerawanan pangan dan kelaparan sering terjadi pada petani skala kecil, nelayan dan masyarakat sekitar hutan yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam yang terdegradasi. Kerawanan pangan juga terjadi pada masyarakat miskin perkotaan, utamanya kaum buruh. Kelompok-kelompok ini tidak cukup akses terhadap pengetahuan dan teknologi, akses fisik terhadap sarana produksi dan pasar. Berbagai persoalan itu muncul akibat masalah paling fundamental, yaitu disharmoni. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang semula dimaksudkan menjaga

harmoni perdagangan global, justru cenderung menciptakan ketimpangan dan pemiskinan di negara-negara berkembang dengan segala instrumen yang memenangkan negara maju.

WTO adalah organisasi multilateral negara-negara yang mengatur jalannya perdagangan bebas dunia. Perdagangan bebas artinya arus barang dan jasa bebas melewati batas-batas Negara tanpa dihambat oleh campur tangan pemerintah, baik dalam tarif maupun nontarif. Konsep ini didasarkan pada teori Liberal Klasik yang menyatakan perdagangan dapat dilakukan paling baik, sumber daya dapat dialokasikan paling efisien, dan kesejahteraan masyarakat dicapai paling tinggi apabila semua produsen dibiarkan menghasilkan barang atau jasa terbaik yang dapat mereka produksi untuk kemudian dijual dalam iklim persaingan bebas terbuka. Di tingkat lokal ada pembagian kerja, sedangkan di tingkat internasional setiap negara harus terkonsentrasi menghasilkan produk-produk yang bisa dihasilkan secara efisien (Deliarnov, 2006).

Tujuan utama WTO pada awalnya adalah untuk menaikkan standar hidup dan menjamin peningkatan lapangan kerja dengan memperluas produksi dan perdagangan melalui eksploitasi sumber daya alam dunia secara rasional dan sadar lingkungan. Dalam perjalanannya, tujuan awal ini semakin redup dan misinya diganti dengan “mantra” baru yang disebut pasar bebas. Misi baru ini adalah bagian dari Konsensus Washington, yaitu persekongkolan antara IMF, Bank Dunia, dan Departemen Keuangan Amerika Serikat yang menginginkan semua negara membuka diri bagi masuknya barang, jasa, modal, dan Sumber Daya Manusia, sehingga tercipta perekonomian dunia tanpa batas. Gejala-gejala yang memperlihatkan semakin terintegrasinya Negara-negara dan penduduk dunia yang disebabkan oleh berkurangnya sekat-sekat dan halangan artifial bagi aliran barang, jasa, modal, pengetahuan,

dan Sumber Daya Manusia dari satu negara ke Negara lain ini yang disebut globalisasi. Aspek paling penting dari globalisasi ekonomi adalah semakin dikurangnya sekat-sekat dan hambatan ekonomi antar Negara, semakin menyebarnya perdagangan, financial, dan aktifitas produksi secara internasional, dan dalam proses ini semakin tumbuhnya kekuatan *Trans National Corporations* (TNCs), dan lembaga keuangan internasional. Dari ketiga aspek liberalisasi (keuangan, perdagangan, dan investasi), yang paling cepat perkembangannya adalah proses liberalisasi finansial.

IMF dan Bank Dunia pada berbagai kesempatan selalu berusaha meyakinkan bahwa liberalisasi dan globalisasi akan memacu pertumbuhan. Padahal, belum ada teori dan bukti bahwa liberalisasi pasar betul-betul dapat memacu pertumbuhan (Stglitz, 2001). Sebagian pakar justru menilai sistem ini bisa mengakibatkan inefisiensi jika ada pihak-pihak yang memonopoli. Kebijakan liberalisasi pasar yang terlalu dipaksakan di negara-negara berkembang hanya akan membuka peluang bagi masuknya produk-produk impor, mengakibatkan produk-produk hasil industri dalam negeri tergencet karena tidak mampu bersaing. Sebagai akibatnya, yang terjadi justru semakin melemahnya pertumbuhan dan meluasnya pengangguran di berbagai sektor ekonomi, terutama di sektor pertanian dan industri.

Dikatakan bahwa globalisasi akan membantu negara-negara berkembang meningkatkan ekspor dan menyediakan barang-barang dan jasa dengan harga lebih murah. Ini juga hanya sebuah janji kosong, sebab dalam perekonomian global, negara-negara berkembang justru menghadapi bentuk kompetisi baru dari negara-negara maju yang lebih mampu menghasilkan berbagai produk dengan harga lebih murah, sedangkan negara-negara berkembang sulit menembus pasar

negara-negara maju yang dengan berbagai cara menghambat masuknya produk-produk dari negara-negara berkembang. Globalisasi dikatakan dapat meningkatkan standar hidup dan mengurangi kemiskinan. Dalam kenyataan, yang makin tinggi standar hidupnya ialah mereka yang mendapat akses, sedangkan sebagian besar kelompok marginal lain semakin terjepit. Pada Konferensi Tingkat Tinggi mengenai Pembangunan Berkelanjutan (*World Summit of Social Development, WSSD*) di Johannesburg September 2002, terungkap bahwa komitmen Negara-negara maju untuk mengurangi kemiskinan semakin lemah dan selain itu juga tidak komitmen baru untuk meningkatkan pedanaan bagi pembangunan berkelanjutan.

Perihal Kesejahteraan Petani

Sejak tahun 1970-an ada dua perkembangan yang menjadi perhatian dan pokok pengamatan peneliti-peneliti daerah pedesaan Jawa, yaitu dampak program intensifikasi pertanian pangan dan meningkatnya kepadatan penduduk maupun kepadatan pertanian. Walaupun di satu pihak produksi padi meningkat, areal pertanian secara menyeluruh juga menyempit, sehingga kelebihan buruh tani yang tidak tersalurkan ke sektor lain kedudukannya semakin lemah (Sediono M.P. Tjondronegoro, 1987). Sebenarnya negara-negara lain telah mendahului Indonesia memasuki era intensifikasi pertanian pangan atau sering diistilahkan "Revolusi Hijau", telah menunjukkan pula gejala bertambah kuatnya kedudukan petani kaya di pasaran baik komoditi maupun tenaga kerja, timbulnya akumulasi tanah di lapisan ekonomi kuat dan penerimaan teknologi maju lebih cepat oleh mereka.

Sebaliknya di lapangan petani kecil justru terjadi proses pemelaran, antara lain karena menjual tanah garapan yang sudah sempit, dan menjual tenaganya dengan persyaratan yang semakin berat. Kedua proses yang bertolak belakang ini sudah agak lama diamati beberapa peneliti di Indonesia (M.Lyon, 1970, W.L.

Collier dan Sayogyo, 1971), akan tetapi menarik kesimpulan secara tuntas memang belum terjadi. Mengapa? Barangkali oleh karena proses-proses individualisasi dan komersialisasi di daerah pedesaan akibat “Revolusi Hijau” di bidang pertanian, ternyata dari beberapa studi lain tidak berlangsung secepat yang diduga. Proses perenggangan dan pertentangan antarlapisan sosial di daerah pedesaan atau polarisasi agaknya tidak terjadi serentak di mana-mana.

Indonesia saat ini mengalami krisis lahan pangan. Hal ini akibat alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian, serta alih fungsi lahan dari yang semula ditanami padi ke nonpangan. BPS menghitung luas lahan baku pangan 2002 seluas 7,75 juta hektar. Dengan laju konversi lahan 110.000 hektar per tahun, dalam waktu sembilan tahun lahan baku tinggal 6,76 juta hektar (Kompas, 3/11/2011). Mengacu data BPS, dalam kondisi iklim basah di saat hujan terus turun, luas pertanaman padi hanya 6,2 juta hektar. Bila dalam setahun lahan itu ditanami dua kali, luas tanam hanya 12,4 juta hektar. Padahal, indeks pertanaman padi 2011 kurang dari dua. Alih fungsi lahan 110.000 hektar belum menghitung luas alih fungsi tanaman yang mencapai 74.000 hektar. Dengan kata lain, setiap tahun ada petani yang beralih menanam padi ke tanaman *nonpaid*, seperti holtikutura, tebu, karet dan kelapa sawit.

Satu konsep yang sangat pokok dalam Sosiologi Pedesaan adalah desa. Sekalipun desa dalam pengertian yang sangat umum merupakan cerminan dari kehidupan yang bersahaja, yang belum maju, namun untuk memahaminya tidaklah sederhana. Pengertian desa secara umum lebih sering dikaitkan dengan pertanian. Egon E. Bergel (1955), misalnya, mendefinisikan desa sebagai “setiap pemukiman para petani (*peasants*).

Suatu definisi yang dikemukakan oleh Paul H. Landis, seorang sarjana Sosiologi Pedesaan Amerika Serikat, sebagaimana dikutip Rahardjo

(1999), dapat dikatakan cukup mewakili pendefinisian desa umumnya. Menurut dia, definisi desa dapat dipilah menjadi tiga, tergantung pada tujuan analisa. Untuk tujuan analisa statistik, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2500 orang. Untuk tujuan analisa sosial-psikologik, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal di antara warganya. Sedangkan untuk tujuan analisa ekonomik, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya tergantung kepada pertanian.

Sejauh mana kesahihan definisi desa dari P.H. Landis itu untuk diterapkan secara umum? Dalam hal ini perlu sikap yang kritis untuk menentukannya. Namun, ada kecenderungan definisi ke tiga nampaknya merupakan definisi yang lebih tepat untuk diterapkan secara umum, baik di negara yang belum maju maupun yang sudah maju, karena untuk tingkat perkembangan masyarakat apapun atau di manapun desa selalu berfungsi sebagai penghasil pangan. Dengan lain perkataan, sejauh ini pertanian (untuk pangan) selalu masih berada di desa, dan oleh karena itu pertanian dan desa masih merupakan dua gejala yang belum dapat dipisahkan. Kalaupun ada orang-orang kota yang bertani (*gentlemen farmers*) seperti misalnya yang terlihat di Amerika Serikat, mereka melakukan aktivitasnya di daerah pedesaan (lihat: Rahardjo, 1999). Kelemahan definisi ini adalah tidak memperhitungkan atau mencakup desa-desa non-pertanian. Di samping itu, di Negara-negara maju telah banyak desa-desa yang jumlah petaninya telah menjadi minoritas. Dengan kata lain, telah banyak desa-desa non-pertanian, dalam mana penduduknya bekerja di luar sektor pertanian, sehingga kehidupan masyarakatnya tidak lagi merupakan representasi masyarakat petani.

KESIMPULAN

Sektor pertanian masyarakat pribumi yang dalam analisis Boeke, dianggap masih dalam tahapprakapitalis dinilai hanya bersifatsubsisten, inferior apabila berhadapan dengan perekomian asing Barat, stagnan dan sulit berkembang untuk menjadi perekomian kapitalis seperti yang terjadi di Eropa, yang karenanya tidak perlu dipaksakan untuk mengikkuti ekonomi pasar. Pandangan Boeke ini dibantah oleh Houben dan Burgre yang mengatakannya pesimis melihat potensi perekonomian masyarakat pribumi yang pada realitasnya tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sendiri tetapi juga berorientasi pasar. Pandangan Boeke dianggap tidak lebih merupakan mitos yang dilebih-lebihkan belaka. Untuk itu, Th. A. Fruin menekankan perlunya transformasi struktural dari para elite pemerintah sehingga pertanian dapat menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan menyejahterakan masyarakat pribumi/petani.

Kontroversi mengenai mana yang harus lebih didahulukan lebih dulu antara sektor pertanian dan industrialisasi juga mengemuka di masa pascakolonial. Banyak yang menyarankan agar Negara-negara yang baru merdeka atau berkembang lebih mengutamakan industrialisasi ketimbang mendorong sektor pertanian dengan berbagai alasan. Melanjutkan anjuran Syafrudin Prawiranegara (lihat: Rahardjo, 2011) di masa Orde Lama yang menolak pikiran industrialisasi, Orde Baru yang berdiri pada 1967 memilih melakukan pembangunan pertanian sebagai basis pertumbuhan ekonomi untuk melakukan industrialisasi. Program swasembada pangan pun dicanangkan sejak 1974, lalu berhasil dilakukan pada 1985. Pilihan Orde Baru ini menggemakan kembali anjuran Boeke di zaman Hindia Belanda yang seolah mendapatkan konteksnya yang pas. Bahkan pada 1974, *Food and Agricultural Organization* menyebutkan bahwa perekonomian untuk konsumsi sendiri sebagai ketahanan pangan yang menjamin pertumbuhan

ekonomi, artinya pemikiran perekonomian terbelakang prakapitalis menurut Boeke yang dilakukan masyarakat pribumi ternyata bervisi jauh ke depan dalam perekonomian modern umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Deliarnov, (2006). *Ekonomi Politik Mencakup Berbagai Teori dan Konsep yang Komprehensif*. Jakarta; Erlangga.
- Kaman Nainggolan, (2006). "Kemiskinan dan Pangan Melawan Kelaparan di Abad XXI". *Kompas*, 16 Pebruari 2006
- Khudori, (2011). "Menata Ulang Basis Produksi Pangan". *Kompas*, 7 Nopember 2011
- Khudori, (2012). "Impor Pangan yang Mencemaskan", dalam *Kompas*, 2 Januari 2012
- Posman Sibuea, (2011). "Penjajahan Kapitalisme Pangan". *Media Indonesia*, 19 Oktober 2012
- Sediono M.P. Tjondronegoro, (1987). *Kata Sambutan dalam Buku: Kemiskinan dan Polarisasi Sosial, studi Kasus di Desa Bulugede, Kabupaten Kendal Jawa Tengah*. Jakarta; UI Press
- Siswono Yudo Husodo, (2012). "Kemandirian dan Kedaulatan Pangan", dalam *Kompas*, 1 Agustus 2012